

PELAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyampaikan laporan kinerja secara periodik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Dengan berpedoman pada kedua regulasi tersebut, laporan kinerja triwulan memiliki kedudukan yang strategis, bukan hanya sebagai kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai alat pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Laporan Kinerja triwulan I tahun 2025 ini merupakan ikhtisar yang menggambarkan secara ringkas tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI & CAPAIAN KINERJA								CAPAIAN KINERJA TAHUNAN (%)	PENGAMPU	
				TAHUNA	TRIWULAN				TAHUNA	TRIWULAN									
					N	I	II	III		IV	N	I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																		
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital (Meningkat Pada)	Nilai	3,12	-	-	-	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Meningkat Pada)	Indeks	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pencapaian kinerja pada periode ini menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, ditinjau berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan atas pencapaian kinerja sasaran yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital

Sistem pemerintah digital, atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam konteks Indonesia, adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efisien, transparan, dan akuntabel, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengelola data dan proses administrasi secara modern dan terintegrasi. Penilaian Sistem Pemerintah Digital ini merupakan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Pemerintah Digital oleh Kementerian PANRB. Komponen dalam penilaian indeks pemerintah digital umumnya meliputi aspek tata kelola digital, infrastruktur dan layanan digital, serta kualitas sumber daya manusia dan ekosistem digital yang mendukungnya, seperti yang terlihat pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup arsitektur, peta rencana, dan keamanan SPBE, serta Indeks Transformasi Digital (Indeks TDN) dan Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) yang menilai kesiapan dan kualitas tata kelola, layanan, serta infrastruktur digital.

a. Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital

Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital merujuk pada sejauh mana suatu instansi pemerintah telah menerapkan prinsip, komponen, dan struktur dari Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintah Digital dalam tata kelola dan pelaksanaan layanan digitalnya. Di tahun 2025 ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut melaksanakan beberapa kegiatan, yakni:

1. Penyesuaian dokumen arsitektur Pemerintah Digital yang sebelumnya arsitektur SPBE dengan Arsitektur Pemerintah Digital Nasional dan Rencana Induk Pemerintah Digital.
2. Integrasi antar domain arsitektur yang telah dan akan dibangun, seperti proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan.
3. Penyiapan layanan digital terpadu yang dihasilkan dari penerapan arsitektur SPBE/Pemerintah Digital.

4. Penyusunan kembali Peta Rencana Pemerintah Digital (yang sebelumnya Peta Rencana SPBE) sesuai dengan Peta Rencana Pemerintah Digital Nasional dan RPJMD Kepala Daerah terpilih.
5. Monitoring dan evaluasi atas hasil SPBE tahun sebelumnya.

b. Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kesiapan suatu wilayah dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik melalui website PPID, website resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta kontrak media online dan cetak.
2. Penyediaan akses internet terpadu Lingkup SKPD Pemkab Tanah Laut
3. Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dalam tata naskah dinas.

HAMBATAN

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis digital (elektronik) pada periode ini adalah sebagai berikut:

1. Belum rampungnya penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029 sehingga penyesuaian dokumen arsitektur Pemerintah Digital dan rencana induk pemerintah digital belum dapat dilaksanakan.
2. Cukup sulitnya pengintegrasian antar domain arsitektur yang telah dan akan dibangun, seperti proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan dikarenakan keterbatasan personil dan SDM yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.
3. Belum optimalnya layanan digital terpadu yang dihasilkan dari penerapan arsitektur tersebut diantaranya melakukan dukungan dalam layanan mall pelayanan publik dan persiapan layanan terpadu call center 112.
4. Belum adanya peta rencana induk Pemerintah Digital yang disusun dengan menyesuaikan arah kebijakan RPJMD yang baru sehingga perlu dilakukan

penyusunan kembali Peta Rencana Pemerintah Digital (yang sebelumnya Peta Rencana SPBE) sesuai dengan Peta Rencana Pemerintah Digital Nasional dan RPJMD Kepala Daerah terpilih.

5. Belum maksimalnya kinerja Tim internal SPBE Kabupaten Tanah Laut sehingga perlu dilakukan koordinasi internal secara intensif.
6. Masih belum optimalnya pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik.
7. Belum maksimalnya pemanfaatan internet terpadu Lingkup SKPD Pemkab Tanah Laut.
8. Belum semua SKPD mampu menerapkan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik.

RENCANA AKSI

Untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis digital, beberapa langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan penyesuaian dan penyusunan dokumen arsitektur Pemerintah Digital dan rencana induk pemerintah digital setelah rampungnya penyusunan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029.
2. Melakukan Integrasi antar domain arsitektur yang telah dan akan dibangun, seperti proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan.
3. Menyiapkan layanan digital terpadu yang dihasilkan dari penerapan arsitektur tersebut diantaranya melakukan dukungan dalam layanan mall pelayanan publik dan persiapan layanan terpadu call center 112.
4. Melakukan penyusunan kembali Peta Rencana Pemerintah Digital (yang sebelumnya Peta Rencana SPBE) sesuai dengan Peta Rencana Pemerintah Digital Nasional dan RPJMD Kepala Daerah terpilih.
5. Melakukan rapat koordinasi internal tim SPBE Kabupaten Tanah Laut atas hasil evaluasi SPBE tahun sebelumnya sebagai evaluasi dan sebagai upaya perbaikan di tahun berikutnya.
6. Meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik melalui website PPID, website resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta kontrak media online dan cetak.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan akses internet terpadu Lingkup SKPD Pemkab Tanah Laut.

8. Meningkatkan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dalam administrasi pemerintahan.

B. REALISASI KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp. 14.367.072.685,23**.

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025 TW I

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI TRIWULAN I 2025 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN	0	0	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	
	Restribusi Daerah	0	0	
2	BELANJA	14.367.072.685,23	2.049.538.101,00	14,27
	BELANJA OPERASI	12.117.917.651,90	1.993.238.101,00	16,45
	Belanja Pegawai	4.058.545.452,00	902.869.667,00	22,25
	Belanja Barang dan Jasa	7.325.644.199,90	356.640.434,00	4,87
	Belanja Hibah	733.728.000,00	733.728.000,00	100
3	BELANJA MODAL	2.202.449.532,33	56.300.000,00	2,56
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	339.000.167,33	56.300.000,00	16,61
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.663.649.365,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	199.800.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	14.367.072.685,23	2.049.538.101,00	14,27
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(14.367.072.685,23)		

*Sumber/Pengolah Data dari Sub Bagian Keuangan Diskominfostasan Tahun 2025

C. PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan I tahun 2025. Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan I Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian masih belum memenuhi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih di bawah target. Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Demikian laporan kinerja Triwulan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut ini dibuat, semoga dapat menjadi salah satu bahan yang dapat memberikan data dan informasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada periode triwulan yang akan datang.

Pelaihari, 9 April 2025

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Tanah Laut



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840320 200212 2 002

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1,00	9.110.000	1	12.170.896	1	2.521.900						1	2.521.900	100,00%	20,72%	2,00	11.631.900	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	2,00	11.293.200	2	9.823.208	1	4.390.000						1	4.390.000	50,00%	44,69%	3,00	15.683.200	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	12,00	4.560.000	2	6.000.000	2	800.000						1	800.000	25,00%	13,33%	12,50	5.360.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	2,00	14.800.000	2	13.000.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	2,00	14.800.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	150,00	381.877.695	12	83.455.000	3	38.647.734						3	38.647.734	25,00%	46,31%	153,00	420.525.429	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	100,00	200.000	12	2.451.310	3	2.192.000						3	2.192.000	25,00%	89,42%	103,00	2.392.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	-	160,00	114.281.400	100	47.949.250	-	34.100.000						-	34.100.000	0,00%	71,12%	160,00	148.381.400	0,00%	0,00%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	4,00	26.280.000	1	5.597.033	1	5.000.000						1	5.000.000	100,00%	89,33%	5,00	31.280.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1,00	88.001.400	1	42.352.217	1	29.100.000						1	29.100.000	100,00%	68,71%	2,00	117.101.400	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	-		1.322.774.867	100	815.115.060	-	165.783.644						-	165.783.644	0,00%	20,34%	0,00	1.488.558.511	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	12,00	177.732.260	12	270.000.000	3	37.024.460						3	37.024.460	25,00%	13,71%	15,00	214.756.720	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	12,00	1.145.042.607	12	545.115.060	3	128.759.184						3	128.759.184	25,00%	23,62%	15,00	1.273.801.791	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	-	205,00	117.251.103	100	285.993.073	-	10.250.000						-	10.250.000	0,00%	3,58%	205,00	127.501.103	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	1,00	31.331.003	1	37.500.000	1	4.400.000						0	4.400.000	25,00%	11,73%	1,25	35.731.003	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	8,00	60.021.100	8	76.590.000	8	5.850.000						2	5.850.000	25,00%	7,64%	10,00	65.871.100	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	30,00	16.200.000	22	15.000.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	30,00	16.200.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				1,00	9.699.000	1	156.903.073	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	9.699.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	66,12%	22,00%					
Predikat Kinerja																	Sedang	Sangat Rendah					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																							
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase SKPD yang mempublikasikan seluruh daftar informasi publik ()	90,00	20.420.977.986	73,00	-	75	2.868.570.094	767.665.500	-	-	-	-	-	-	767.665.500	0,00%	26,76%	0,00	767.665.500	0,00%	3,76%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Persen)		20.420.977.986	270,00	-	100	2.868.570.094	767.665.500	-	-	-	-	-	-	767.665.500	0,00%	26,76%	270,00	767.665.500	0,00%	14,44%	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	3,00	938.941.348			3	23.065.541	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	5,00	5.940.424.686			4	769.890.773	1	740.478.000					1	740.478.000	25,00%	96,18%	1,00	740.478.000	20,00%	12,47%	Tidak Ada
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	3,00	383.860.584			3	15.437.845	1	-					1	-	33,33%	0,00%	1,00	-	33,33%	0,00%	Tidak Ada
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	20,00	12.538.465.000			15	1.904.875.000	15	15.750.000					15	15.750.000	100,00%	0,83%	15,00	15.750.000	75,00%	0,13%	Tidak Ada
	Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	760,00	619.286.368			750	155.300.935	187	11.437.500					187	11.437.500	24,93%	7,36%	187,00	11.437.500	24,61%	1,85%	Tidak Ada
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	74,64%	26,76%					
Predikat Kinerja																	Sedang	Sangat Rendah					
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika (%)	100,00	13.977.190.921	100,00	-	100	5.798.687.271	72.717.656	-	-	-	-	-	-	72.717.656	0,00%	1,25%	0,00	72.717.656	0,00%	0,52%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Persen)		13.977.190.921	100,00	-	100	5.798.687.271	72.717.656	-	-	-	-	-	-	72.717.656	0,00%	1,25%	100,00	72.717.656	0,00%	0,52%	
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah (Aplikasi)		-			3	280.411.295	-	500.000					-	500.000	0,00%	0,18%	0,00	500.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	31,00	13.977.190.921			31	5.518.275.976	31	72.217.656					8	72.217.656	25,00%	1,31%	7,75	72.217.656	25,00%	0,52%	Tidak Ada
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	23,79%	1,25%					

														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																							
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) ()	2,70	-	2,25	-	2,3	144.132.038	-	10.325.000	-	-	-	-	-	10.325.000	0,00%	7,16%	0,00	10.325.000	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Tanah Laut (Persen)		-	210,00	-	100	144.132.038	-	10.325.000	-	-	-	-	-	10.325.000	0,00%	7,16%	210,00	10.325.000	0,00%			
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang nilis tepat waktu (Persentase)		-		-	80	93.882.038	20	1.575.000					20	1.575.000	25,00%	1,68%	20,00	1.575.000	0,00%	Tidak Ada		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	*Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen)		-		-	5	50.250.000	-	8.750.000					-	8.750.000	0,00%	17,41%	0,00	8.750.000	0,00%	Tidak Ada		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																16,28%	7,16%						
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ()	477,00	-	469,00	-	189.100.000	470	107.326.993	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	189.100.000	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Persen)		-		-	189.100.000	100	107.326.993	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	189.100.000	0,00%			
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)		-	1,00	-	40.515.000	1	71.438.127	-	-					-	0,00%	0,00%	1,00	40.515.000	0,00%	Tidak Ada		
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)		-	20,00	-	148.585.000	32	35.888.866	25	-				25	-	78,13%	0,00%	45,00	148.585.000	0,00%	Tidak Ada		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																26,12%	0,00%						
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
14.367.072.685														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				49,94%	14,27%				
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):



No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

PELAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyampaikan laporan kinerja secara periodik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Dengan berpedoman pada kedua regulasi tersebut, laporan kinerja triwulan memiliki kedudukan yang strategis, bukan hanya sebagai kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai alat pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Laporan Kinerja triwulan II tahun 2025 ini merupakan ikhtisar yang menggambarkan secara ringkas tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				REALISASI & CAPAIAN KINERJA								CAPAIAN KINERJA TAHUNAN (%)	PENGAMPU			
				TAHUNA	TRIWULAN				TAHUNA	TRIWULAN										
					N	I	II	III		IV	N	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																			
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital (Meningkat Pada)	Nilai	3,12	-	-	-	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Meningkat Pada)	Indeks	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pencapaian kinerja pada periode ini menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, ditinjau berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan atas pencapaian kinerja sasaran yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital

Sistem pemerintah digital, atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam konteks Indonesia, adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efisien, transparan, dan akuntabel, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengelola data dan proses administrasi secara modern dan terintegrasi. Penilaian Sistem Pemerintah Digital ini merupakan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Pemerintah Digital oleh Kementerian PANRB. Komponen dalam penilaian indeks pemerintah digital umumnya meliputi aspek tata kelola digital, infrastruktur dan layanan digital, serta kualitas sumber daya manusia dan ekosistem digital yang mendukungnya, seperti yang terlihat pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup arsitektur, peta rencana, dan keamanan SPBE, serta Indeks Transformasi Digital (Indeks TDN) dan Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) yang menilai kesiapan dan kualitas tata kelola, layanan, serta infrastruktur digital.

a. Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital

Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital merujuk pada sejauh mana suatu instansi pemerintah telah menerapkan prinsip, komponen, dan struktur dari Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintah Digital dalam tata kelola dan pelaksanaan layanan digitalnya. Pada triwulan II di tahun 2025 ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut melaksanakan beberapa kegiatan, yakni:

1. Penyesuaian dokumen arsitektur Pemerintah Digital yang sebelumnya arsitektur SPBE dengan Arsitektur Pemerintah Digital Nasional dan Rencana Induk Pemerintah Digital.
2. Integrasi antar domain arsitektur yang telah dan akan dibangun, seperti proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan.
3. Penyiapan layanan digital terpadu yang dihasilkan dari penerapan arsitektur SPBE/Pemerintah Digital.

4. Penyusunan kembali Peta Rencana Pemerintah Digital (yang sebelumnya Peta Rencana SPBE) sesuai dengan Peta Rencana Pemerintah Digital Nasional dan RPJMD Kepala Daerah terpilih.
5. Monitoring dan evaluasi atas hasil SPBE tahun sebelumnya.

b. Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kesiapan suatu wilayah dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik melalui website PPID, website resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta kontrak media online dan cetak.
2. Penyediaan akses internet terpadu Lingkup SKPD Pemkab Tanah Laut
3. Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dalam tata naskah dinas.

HAMBATAN

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis digital (elektronik) pada periode ini adalah sebagai berikut:

1. Proses perampungan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029 sudah hampir selesai sehingga persiapan penyesuaian dokumen arsitektur Pemerintah Digital dan rencana induk pemerintah digital sudah dapat dilaksanakan.
2. Cukup sulitnya pengintegrasian antar domain arsitektur yang telah dan akan dibangun, seperti proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan dikarenakan keterbatasan personil dan SDM yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.
3. Belum optimalnya layanan digital terpadu yang dihasilkan dari penerapan arsitektur tersebut diantaranya melakukan dukungan dalam layanan mall pelayanan publik dan persiapan layanan terpadu call center 112.

4. Belum maksimalnya kinerja Tim internal SPBE Kabupaten Tanah Laut sehingga perlu dilakukan koordinasi internal secara intensif.
5. Masih belum optimalnya pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik.
6. Belum maksimalnya pemanfaatan internet terpadu Lingkup SKPD Pemkab Tanah Laut.
7. Belum semua SKPD mampu menerapkan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik.

RENCANA AKSI

Untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis digital, beberapa langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Bapperida terkait dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029.
2. Melakukan Integrasi antar domain arsitektur yang akan dilaksanakan salah satunya adalah pengintegrasian aplikasi satu data ke dalam e-walidata sipd-ri.
3. Menyiapkan layanan digital terpadu yang dihasilkan dari penerapan arsitektur tersebut diantaranya melakukan dukungan dalam layanan mall pelayanan publik dan persiapan layanan terpadu call center 112 (RAZA LAKAS) serta layanan konsultasi publik melalui radio daerah dengan program RAZA WALI .
4. Melakukan penyusunan kembali Peta Rencana Pemerintah Digital (yang sebelumnya Peta Rencana SPBE) sesuai dengan Peta Rencana Pemerintah Digital Nasional dan RPJMD Kepala Daerah terpilih.
5. Melakukan rapat koordinasi internal tim SPBE Kabupaten Tanah Laut atas hasil evaluasi SPBE tahun sebelumnya sebagai evaluasi dan sebagai upaya perbaikan di tahun berikutnya.
6. Meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik melalui website PPID, website resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta kontrak media online dan cetak melalui pelatihan atau bimbingan teknis.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan akses internet terpadu Lingkup SKPD Pemkab Tanah Laut dengan menyediakan layanan sistem monitoring jaringan.
8. Meningkatkan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dalam administrasi pemerintahan melalui sosialisasi atau pun surat edaran.

B. REALISASI KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp. 14.367.072.685,23**.

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025 TW II

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI TRIWULAN II 2025 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00
	Restribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	14.367.072.685,23	4.340.449.169,00	30,21
	BELANJA OPERASI	12.117.917.651,90	4.284.149.169,00	35,35
	Belanja Pegawai	4.058.545.452,00	2.059.149.897,00	50,74
	Belanja Barang dan Jasa	7.325.644.199,90	1.491.271.272,00	20,36
	Belanja Hibah	733.728.000,00	733.728.000,00	100
3	BELANJA MODAL	2.202.449.532,33	56.300.000,00	2,56
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	339.000.167,33	56.300.000,00	16,61
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.663.649.365,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	199.800.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	14.367.072.685,23	4.340.449.169,00	30,21
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(14.367.072.685,23)	(4.340.449.169,00)	30,21

*Sumber/Pengolah Data dari Sub Bagian Keuangan Diskominfostasan Tahun 2025

C. PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan II tahun 2025. Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan II Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian masih belum memenuhi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih di bawah target. Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Demikian laporan kinerja Triwulan II Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut ini dibuat, semoga dapat menjadi salah satu bahan yang dapat memberikan data dan informasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada periode triwulan yang akan datang.

Pelaihari, 1 Juli 2025

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Tanah Laut



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840320 200212 2 002

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 * 12		15=14/5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Semua Bidang																														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Persen)	82,90	-	82,10	-	82,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persen)	100,00	-	100,00	-	100	-	5.493.555.503	-	5.448.356.289	-	1.198.829.945	-	1.364.262.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	-	-	-	-	2.750.000	100	2.926.535	25	-	25	-	-	-	-	-	50	-	50,00%	0,00%	0,00	2.750.000	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	-	-	1.850.000	7	2.055.880	1	-	3	-	-	-	-	-	4	-	57,14%	0,00%	4,00	1.850.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	6,00	900.000	5	870.655	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	60,00%	0,00%	9,00	900.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	-	-	251,00	3.297.628.438	100	4.062.085.580	-	902.869.667	-	1.156.960.230	-	-	-	-	-	-	2.059.829.897	-	0,00%	50,71%	251,00	5.357.458.335	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	77,00	3.294.111.538	25	4.058.545.452	20	902.869.667	23	1.156.280.230	-	-	-	-	-	23	2.059.149.897	-	92,00%	50,74%	100,00	5.353.261.435	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	-	5,00	3.516.900	5	3.540.128	-	-	2	680.000	-	-	-	-	-	2	680.000	-	40,00%	19,21%	7,00	4.196.900	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	-	-	250,00	29.200.000	100	46.705.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	250,00	29.200.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-	0,00	-	0	16.705.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	5,00	29.200.000	0	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5,00	29.200.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	-	-	250,00	609.669.695	100	187.581.291	-	85.826.634	-	51.783.012	-	-	-	-	-	-	137.609.646	-	0,00%	73,36%	250,00	747.279.341	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	2,00	6.777.000	1	8.446.101	1	6.907.500	-	-	-	-	-	-	-	1	6.907.500	-	100,00%	81,78%	3,00	13.684.500	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	7,00	181.051.800	4	52.234.776	2	30.367.500	1	12.936.000	-	-	-	-	-	3	43.303.500	-	75,00%	82,90%	10,00	224.355.300	0,00%	0,00%		Tidak Ada	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			-	1,00	9.110.000	1	12.170.896	1	2.521.900	1	5.836.000						2	8.357.900	100,00%	68,67%	3,00	17.467.900	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			-	2,00	11.293.200	2	9.823.208	1	4.390.000	1	486.000						2	4.876.000	100,00%	49,64%	4,00	16.169.200	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)			-	12,00	4.560.000	2	6.000.000	2	800.000	2	1.200.000						1	2.000.000	50,00%	33,33%	13,00	6.560.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			-	2,00	14.800.000	2	13.000.000	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%	2,00	14.800.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			-	150,00	381.877.695	12	83.455.000	3	38.647.734	3	31.325.012						6	69.972.746	50,00%	83,84%	156,00	451.850.441	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			-	100,00	200.000	12	2.451.310	3	2.192.000	3	-						6	2.192.000	50,00%	89,42%	106,00	2.392.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)			-	160,00	114.281.400	100	47.949.250	-	34.100.000	-	-						-	34.100.000	0,00%	71,12%	160,00	148.381.400	0,00%	0,00%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			-	4,00	26.280.000	1	5.597.033	1	5.000.000	-	-						1	5.000.000	100,00%	89,33%	5,00	31.280.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			-	1,00	88.001.400	1	42.352.217	1	29.100.000	-	-						1	29.100.000	100,00%	68,71%	2,00	117.101.400	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah (Persen)			-		1.322.774.867	100	815.115.060	-	165.783.644	-	130.906.678						-	296.690.322	0,00%	36,40%	0,00	1.619.465.189	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			-	12,00	177.732.260	12	270.000.000	3	37.024.460	3	36.224.166						6	73.248.626	50,00%	27,13%	18,00	250.980.886	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			-	12,00	1.145.042.607	12	545.115.060	3	128.759.184	3	94.682.512						6	223.441.696	50,00%	40,99%	18,00	1.368.484.303	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)			-	205,00	117.251.103	100	285.993.073	-	10.250.000	-	24.612.600						-	34.862.600	0,00%	12,19%	205,00	152.113.703	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			-	1,00	31.331.003	1	37.500.000	1	4.400.000	1	6.600.000						1	11.000.000	50,00%	29,33%	1,50	42.331.003	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)			-	8,00	60.021.100	8	76.590.000	8	5.850.000	8	11.462.600						4	17.312.600	50,00%	22,60%	12,00	77.333.700	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			-	30,00	16.200.000	22	15.000.000	-	-	10	6.550.000						10	6.550.000	45,45%	43,67%	40,00	22.750.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				1,00	9.699.000	1	156.903.073	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	9.699.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		80,24%	47,04%					
																	Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase SKPD yang mempublikasikan seluruh daftar informasi publik ()	90,00	20.420.977.986	73,00	-	75	2.868.570.094	-	767.665.500	-	917.478.148	-	-	-	-	1.685.143.648	0,00%	58,75%	0,00	1.685.143.648	8,25%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Persen)		20.420.977.986	270,00	-	100	2.868.570.094	-	767.665.500	-	917.478.148	-	-	-	-	1.685.143.648	0,00%	58,75%	270,00	1.685.143.648	0,00%	38,89%		
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	3,00	938.941.348				3	23.065.541	-	-	2	840.000				2	840.000	66,67%	3,64%	2,00	840.000	66,67%	0,09%	Tidak Ada
	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	5,00	5.940.424.686				4	769.890.773	1	740.478.000	-	8.077.000				1	748.555.000	25,00%	97,23%	1,00	748.555.000	20,00%	12,60%	Tidak Ada
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	3,00	383.860.584				3	15.437.845	1	-	-	1.565.000				1	1.565.000	33,33%	10,14%	1,00	1.565.000	33,33%	0,41%	Tidak Ada
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	20,00	12.538.465.000				15	1.904.875.000	15	15.750.000	15	798.936.036				30	814.686.036	100,00%	42,77%	30,00	814.686.036	150,00%	6,50%	Tidak Ada
	Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	760,00	619.286.368				750	155.300.935	187	11.437.500	142	108.060.112				329	119.497.612	43,87%	76,95%	329,00	119.497.612	43,29%	19,30%	Tidak Ada
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		76,21%	58,75%					
																	Predikat Kinerja		Tinggi	Rendah					
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika (%)	100,00	13.977.190.921	100,00	-	100	5.798.687.271	-	72.717.656	-	-	-	-	-	-	72.717.656	0,00%	1,25%	0,00	72.717.656	0,52%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Persen)		13.977.190.921	100,00	-	100	5.798.687.271	-	72.717.656	-	-	-	-	-	-	72.717.656	0,00%	1,25%	100,00	72.717.656	0,00%	0,52%		
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah (Aplikasi)						3	280.411.295	-	500.000	-	-				-	500.000	0,00%	0,16%	0,00	500.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	31,00	13.977.190.921				31	5.518.275.976	31	72.217.656	31	-				16	72.217.656	50,00%	1,31%	15,50	72.217.656	50,00%	0,52%	Tidak Ada
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		47,58%	1,25%					
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (PS) ()	2,70	-	2,25	-	2,3	144.132.038	10.325.000	-	-	-	-	-	-	10.325.000	0,00%	7,16%	0,00	10.325.000	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Tanah Laut (Persen)			210,00		100	144.132.038	10.325.000	-	-	-	-	-	-	10.325.000	0,00%	7,16%	210,00	10.325.000	0,00%	
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang riilis tepat waktu (Persentase)					80	93.882.038	1.575.000	20					30	1.575.000	37,50%	1,68%	30,00	1.575.000	0,00%	Tidak Ada
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	*Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadada (Dokumen)					5	50.250.000	8.750.000						1	8.750.000	20,00%	17,41%	1,00	8.750.000	0,00%	Tidak Ada
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															31,40%	7,16%					
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ()	477,00	-	469,00	-	189.100.000	470	107.326.993	-	-	-	-	-	-	9.170.000	0,00%	8,54%	0,00	198.270.000	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Persen)					189.100.000	100	107.326.993	-	-	-	-	-	-	9.170.000	0,00%	8,54%	0,00	198.270.000	0,00%	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)			1,00		40.515.000	1	71.438.127	-	-	-	-	-	1	650.000	100,00%	0,91%	2,00	41.165.000	0,00%	Tidak Ada
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)			20,00		148.585.000	32	35.888.866	25					28	8.520.000	87,50%	23,74%	48,00	157.105.000	0,00%	Tidak Ada
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															95,82%	8,54%					
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															65,88%	30,21%					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															Sedang	Sangat Rendah					

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya**):



No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

PELAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyampaikan laporan kinerja secara periodik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Dengan berpedoman pada kedua regulasi tersebut, laporan kinerja triwulan memiliki kedudukan yang strategis, bukan hanya sebagai kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai alat pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Laporan Kinerja triwulan III tahun 2025 ini merupakan ikhtisar yang menggambarkan secara ringkas tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TRIWULAN III TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI & CAPAIAN KINERJA								CAPAIAN KINERJA TAHUNAN (%)	PENGAMPU		
				TAHUNA	TRIWULAN				TAHUNA	TRIWULAN										
					N	I	II	III		IV	N	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																			
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital (Meningkat Pada)	Nilai	3,12	-	-	-	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Meningkat Pada)	Indeks	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pencapaian kinerja pada periode ini menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, ditinjau berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan atas pencapaian kinerja sasaran yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital

Sistem pemerintah digital, atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam konteks Indonesia, adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efisien, transparan, dan akuntabel, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengelola data dan proses administrasi secara modern dan terintegrasi. Penilaian Sistem Pemerintah Digital ini merupakan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Pemerintah Digital oleh Kementerian PANRB. Komponen dalam penilaian indeks pemerintah digital umumnya meliputi aspek tata kelola digital, infrastruktur dan layanan digital, serta kualitas sumber daya manusia dan ekosistem digital yang mendukungnya, seperti yang terlihat pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup arsitektur, peta rencana, dan keamanan SPBE, serta Indeks Transformasi Digital (Indeks TDN) dan Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) yang menilai kesiapan dan kualitas tata kelola, layanan, serta infrastruktur digital.

a. Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital

Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital merujuk pada sejauh mana suatu instansi pemerintah telah menerapkan prinsip, komponen, dan struktur dari Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintah Digital dalam tata kelola dan pelaksanaan layanan digitalnya. Pada triwulan III di tahun 2025 ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut melaksanakan beberapa kegiatan, yakni:

1. Penyesuaian dokumen arsitektur Pemerintah Digital yang sebelumnya arsitektur SPBE dengan Arsitektur Pemerintah Digital Nasional dan Rencana Induk Pemerintah Digital.
2. Integrasi antar domain arsitektur yang telah dan akan dibangun, seperti proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan.

3. Penyiapan layanan digital terpadu yang dihasilkan dari penerapan arsitektur SPBE/Pemerintah Digital.
4. Penyusunan kembali Peta Rencana Pemerintah Digital (yang sebelumnya Peta Rencana SPBE) sesuai dengan Peta Rencana Pemerintah Digital Nasional dan RPJMD Kepala Daerah terpilih.
5. Monitoring dan evaluasi atas hasil SPBE tahun sebelumnya.

b. Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kesiapan suatu wilayah dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik melalui website PPID, website resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta kontrak media online dan cetak.
2. Penyediaan akses internet terpadu Lingkup SKPD Pemkab Tanah Laut
3. Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dalam tata naskah dinas.

HAMBATAN

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis digital (elektronik) pada periode ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya masa transisi perubahan penilaian indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) sehingga Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu menyusun kembali dan menyesuaikan dokumen arsitektur Pemerintah Digital dan rencana induk pemerintah digital terhadap kebijakan-kebijakan pada penilaian indeks pemerintah digital.
2. Cukup sulitnya pengintegrasian antar domain arsitektur yang telah dan akan dibangun, seperti proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan dikarenakan keterbatasan personil dan SDM

yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.

3. Belum maksimalnya kinerja Tim internal SPBE Kabupaten Tanah Laut sehingga perlu dilakukan koordinasi internal secara intensif.
4. Masih belum optimalnya pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik.
5. Belum maksimalnya pemanfaatan internet terpadu Lingkup SKPD Pemkab Tanah Laut.
6. Belum semua SKPD mampu menerapkan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dengan baik.

RENCANA AKSI

Untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis digital, beberapa langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan penyusunan kembali dan penyesuaian dokumen arsitektur Pemerintah Digital dan rencana induk pemerintah digital terhadap kebijakan-kebijakan pada penilaian indeks pemerintah digital sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029.
2. Meningkatkan pemanfaatan integrasi antar domain arsitektur yang akan dilaksanakan salah satunya adalah pengintegrasian aplikasi satu data ke dalam e-walidata sipd-ri.
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Internal SPBE dalam rangka penyusunan kembali Peta Rencana Pemerintah Digital (yang sebelumnya Peta Rencana SPBE) sesuai dengan Peta Rencana Pemerintah Digital Nasional dan RPJMD Kepala Daerah terpilih.
4. Meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik melalui website PPID, website resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta kontrak media online dan cetak melalui pelatihan atau bimbingan teknis. Serta melakukan evaluasi atas pengelolaan informasi publik melalui PPID.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan akses internet terpadu Lingkup SKPD Pemkab Tanah Laut dengan menyediakan layanan sistem monitoring

jaringan. Pada APBD Perubahan 2025 ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut juga melakukan penyusunan dokumen DED daerah *blank spot* di Kabupaten Tanah Laut serta pembangunan tower GSM *Booster* berdasarkan hasil kajian tersebut.

6. Meningkatkan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dalam administrasi pemerintahan melalui sosialisasi atau pun surat edaran.

B. REALISASI KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sebesar **Rp. 20.021.478.299,64**.

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025 TW

III

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI TRIWULAN III 2025 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00
	Restribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	20.021.478.299,64	8.246.480.372,00	41,19
	BELANJA OPERASI	14.965.120.076,90	8.109.750.872,00	54,19
	Belanja Pegawai	4.309.476.880,00	2.920.000.233,00	67,76
	Belanja Barang dan Jasa	9.921.915.196,90	4.456.022.639,00	44,91
	Belanja Hibah	733.728.000,00	733.728.000,00	100
3	BELANJA MODAL	5.056.358.222,74	136.729.500,00	2,70
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.856.558.222,74	110.700.000,00	2,28
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	199.800.000,00	26.029.500,00	13,03
	Jumlah Belanja	20.021.478.299,64	8.246.480.372,00	41,19
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(20.021.478.299,64)	(8.246.480.372,00)	41,19

*Sumber/Pengolah Data dari Bagian Keuangan Tahun 2025

C. PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan III tahun 2025. Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan III Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian masih belum memenuhi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih di bawah target. Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Demikian laporan kinerja Triwulan III Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut ini dibuat, semoga dapat menjadi salah satu bahan yang dapat memberikan data dan informasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada periode triwulan yang akan datang.

Pelaihari, 2 Oktober 2025

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Tanah Laut



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840320 200212 2 002

LAPORAN KINERJA CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

P

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang																												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Persen)	82,90		82,10		82,3																Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
			Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persen)	100,00			5.493.555.503		5.839.197.877		1.198.829.945		1.364.262.520		1.131.987.163			83		3.695.079.628		63,28%		0,00	9.188.635.131		0,00%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)				2.750.000	100	2.926.535	25		25		25				75				75,00%	0,00%	0,00	2.750.000	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				1.850.000	7	2.055.880	1		3		1				5				71,43%	0,00%	5,00	1.850.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			6,00	900.000	5	870.655	2		1		1				4				80,00%	0,00%	10,00	900.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)			251,00	3.297.628.438	100	4.313.017.008	-	902.869.667	40	1.156.960.230	75	861.350.336			115		2.921.180.233		115,00%	67,73%	251,00	6.218.808.671	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)			77,00	3.294.111.538	25	4.309.476.880	20	902.869.667	23	1.156.280.230	23	860.850.336			23		2.920.000.233		92,00%	67,76%	100,00	6.214.111.771	0,00%	0,00%	Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			5,00	3.516.900	5	3.540.128	-		2	680.000	1	500.000			3		1.180.000		60,00%	33,33%	8,00	4.696.900	0,00%	0,00%	Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)			250,00	29.200.000	0	-	-		-	-	-	-			-		-		0,00%	0,00%	250,00	29.200.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0,00	-	0	-	-		-	-	-	-			-		-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			5,00	29.200.000	0	-	-		-	-	-	-			-		-		0,00%	0,00%	5,00	29.200.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)			250,00	609.669.695	100	356.040.559	-	85.826.634	30	51.783.012	70	85.271.786			100		222.981.432		100,00%	62,60%	250,00	832.551.127	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			2,00	6.777.000	1	8.446.101	1	6.907.500	-	-	-	-			1		6.907.500		100,00%	81,78%	3,00	13.684.500	0,00%	0,00%	Tidak Ada

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			-	7,00	181.051.800	4	92.028.831	2	30.367.500	1	12.936.000	-	1.640.000					3	44.943.500	75,00%	48,84%	10,00	225.995.300	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			-	1,00	9.110.000	1	12.170.896	1	2.521.900	1	5.836.000	1	1.180.000					3	9.537.900	100,00%	78,37%	4,00	18.647.900	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			-	2,00	11.293.200	2	12.414.948	1	4.390.000	1	486.000	-	1.560.000					2	6.436.000	100,00%	51,84%	4,00	17.729.200	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)			-	12,00	4.560.000	2	6.000.000	2	800.000	2	1.200.000	2	1.200.000					2	3.200.000	75,00%	53,33%	13,50	7.760.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			-	2,00	14.800.000	2	22.323.473	-	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	2,00	14.800.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			-	150,00	381.877.695	12	200.205.000	3	38.647.734	3	31.325.012	3	79.691.786					9	149.664.532	75,00%	74,76%	159,00	531.542.227	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			-	100,00	200.000	12	2.451.310	3	2.192.000	3	-	3	-					9	2.192.000	75,00%	89,42%	109,00	2.392.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)			-	160,00	114.281.400	100	77.919.250	-	34.100.000	60	-	100	23.400.000					160	57.500.000	160,00%	73,79%	160,00	171.781.400	0,00%	0,00%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			-	4,00	26.280.000	1	5.597.033	1	5.000.000	-	-	-	-					1	5.000.000	100,00%	89,33%	5,00	31.280.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			-	1,00	88.001.400	1	72.322.217	1	29.100.000	-	-	-	23.400.000					1	52.500.000	100,00%	72,59%	2,00	140.501.400	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)			-		1.322.774.867	100	932.454.525	-	165.783.644	50	130.906.678	75	129.449.764					125	426.140.086	125,00%	45,70%	0,00	1.748.914.953	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			-	12,00	177.732.260	12	308.850.000	3	37.024.460	3	36.224.166	3	39.122.548					9	112.371.174	75,00%	36,38%	21,00	290.103.434	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			-	12,00	1.145.042.607	12	623.604.525	3	128.759.184	3	94.682.512	3	90.327.216					9	313.768.912	75,00%	50,32%	21,00	1.458.811.519	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)			-	205,00	117.251.103	100	156.840.000	-	10.250.000	50	24.612.600	75	32.515.277					125	67.377.877	125,00%	42,96%	205,00	184.628.980	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			-	1,00	31.331.003	1	37.500.000	1	4.400.000	1	6.600.000	1	8.931.877					1	19.931.877	75,00%	53,15%	1,75	51.262.880	0,00%	0,00%		Tidak Ada

	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	31,00	13.977.190.921			31	7.324.593.647	31	72.217.656	31	-	31	1.795.654.988	23	1.867.872.644	75,00%	25,50%	23,25	1.867.872.644	75,00%	13,36%	Tidak Ada			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	73,74%	25,08%								
Predikat Kinerja																	Sedang	Sangat Rendah								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) ()	2,70	-	2,25	-	2,3	149.520.853	-	10.325.000		-		36.429.500	-	-	46.754.500	0,00%	31,27%	0,00	46.754.500	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Tanah Laut (Persen)					210,00	149.520.853	-	10.325.000	40	-	75	36.429.500	-	115	46.754.500	115,00%	31,27%	210,00	46.754.500	0,00%	0,00%			
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang riil tepat waktu (Persentase)						80	93.882.038	20	1.575.000	30	-	60	26.529.500	60	28.104.500	75,00%	29,94%	60,00	28.104.500	0,00%	0,00%	Tidak Ada		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	*Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen)						5	56.638.815	-	8.750.000	1	-	2	9.900.000	3	18.650.000	60,00%	33,52%	3,00	18.650.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	69,42%	31,27%								
Predikat Kinerja																	Sedang	Sangat Rendah								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ()	477,00	-	469,00	189.100.000	470	156.701.086	-	9.170.000				22.200.000	-	-	31.370.000	0,00%	20,02%	0,00	220.470.000	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Persen)						189.100.000	100	156.701.086	-	-	40	9.170.000	60	22.200.000	-	100	31.370.000	100,00%	20,02%	0,00	220.470.000	0,00%	0,00%	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)						1,00	40.515.000	1	71.006.520	-	-	1	650.000	-	1	650.000	100,00%	0,92%	2,00	41.165.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)						20,00	148.585.000	32	85.694.566	25	-	28	8.520.000	32	22.200.000	32	30.720.000	100,00%	35,85%	52,00	179.305.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	20,02%								
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
20.021.478.300																	TAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRA		81,13%	42,09%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Tinggi	Sangat Rendah								

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):



No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
-----	----------------------------------	--------------------------------------

1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah